



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAKBANI EKO RAHARJO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukoharjo, 8 Januari 2024

KETUA
KPU KABUPATEN SUKOHARJO
KABUPATEN
SUKOHARJO
SYAKBANI EKO RAHARJO

PERJANJIAN KINERJA

Nama / Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun : 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	9 kali
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabiitas Kinerja KPU	B
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95 %
		Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %
5	Terlaksananya Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100 %
7	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hokum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara
8	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan infomasi hukum.	Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100 %
9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12.425

10	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
11	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan Logistik Pemilu	100 %
12	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	100 %
13	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media lokal	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
14	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stake holder (Partai Politik, LSM,Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %
15	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi "untuk masyarakat umum	100 %
16	Ketersediaan Suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
II Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95 %
2	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	85 %
3.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
		Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjanganya	100 %
4.	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
5.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Prosentase laporan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %
6.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75 %
7.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 laporan
8.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkap dokumen laporan SPIP	95 %
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80 %

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.	Rp. 57.588.200.000,-
2. Program dukungan manajemen.	Rp. 2.620.117.000,-

Sukoharjo, 8 Januari 2024

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

SYAKBANI EKO RAHARJO

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama / Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun : 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	9 kali
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabiitas Kinerja KPU	B
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95 %
		Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %
5	Terlaksananya Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100 %
7	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hokum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara
8	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan infomasi hukum.	Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100 %
9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12.425

10	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
11	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan Logistik Pemilu	100 %
12	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	100 %
13	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media lokal	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
14	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stake holder (Partai Politik, LSM,Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %
15	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi "untuk masyarakat umum	100 %
16	Ketersediaan Suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
II	Program Dukungan Manajemen		
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95 %
2	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	85 %
3.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
		Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjanganya	100 %
4.	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
5.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Prosentase laporan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %
6.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75 %
7.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 laporan
8.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkap dokumen laporan SPIP	95 %
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80 %

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.	Rp. 57.588.200.000,-
2. Program dukungan manajemen.	Rp. 2.620.117.000,-

Sukoharjo, 8 Januari 2024

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo



SYAKBANI EKO RAHARJO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BOEDI SULISTYO
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAKBANI EKO RAHARJO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo



Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo


BOEDI SULISTYO

PERJANJIAN KINERJA

Nama / Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun : 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	9 kali
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabiitas Kinerja KPU	B
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95 %
		Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %
5	Terlaksananya Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100 %
7	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hokum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara
8	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan infomasi hukum.	Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100 %

9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12.425
10	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
11	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan Logistik Pemilu	100 %
12	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	100 %
13	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media lokal	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
14	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stake holder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %
15	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100 %
16	Ketersediaan Suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
II Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95 %
2	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	85 %
3.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
		Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjanganya	100 %
4.	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
5.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Prosentase laporan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %
6.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75 %
7.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 laporan
8.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkap dokumen laporan SPIP	95 %
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80 %

Program

Anggaran

1. Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Rp. 57.588.200.000,-
2. Program dukungan manajemen. Rp. 2.620.117.000,-

Sukoharjo, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo



SYAKBANI EKO RAHARJO

Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Boedi Sulisty', is written over the printed name.

BOEDI SULISTYO

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama / Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun : 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	9 kali
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabiitas Kinerja KPU	B
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95 %
		Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %
5	Terlaksananya Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100 %
7	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hokum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara
8	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan infomasi hukum.	Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100 %

9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12.425
10	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
11	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan Logistik Pemilu	100 %
12	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	100 %
13	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media lokal	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
14	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stake holder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %
15	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi "untuk masyarakat umum	100 %
16	Ketersediaan Suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
II Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95 %
2	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	85 %
3.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
		Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangan	100 %
4.	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
5.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Prosentase laporan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %
6.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75 %
7.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 laporan
8.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkap dokumen laporan SPIP	95 %
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80 %

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.	Rp. 57.588.200.000,-
2. Program dukungan manajemen.	Rp. 2.620.117.000,-

Sukoharjo, 8 Januari 2024

Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo

